

TESIS

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

*Factors Affecting Internet Financial Reporting Disclosure
to Provincial Governments In Indonesia*

disusun dan diajukan oleh
Andi Sayyidatun Ufairah Anto
A062212003



PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

TESIS

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

*Factors Affecting Internet Financial Reporting Disclosure
to Provincial Governments In Indonesia*

disusun dan diajukan oleh
Andi Sayyidatun Ufairah Anto
A062212003



PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Factors Affecting Internet Financial Reporting Disclosure to Provincial Governments In Indonesia

disusun dan diajukan oleh

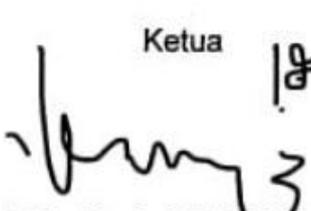
ANDI SAYYIDATUN UFAIRAH ANTO
A062212003

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 12 Januari 2024

Komisi Penasihat

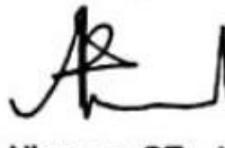
Ketua



18/1/24

Prof. Dr. Kartini, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196503051992032001

Anggota



Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196511271991032001

Ketua Program Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP. 196811251994122002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

Andi Sayyidatun Ufairah Anto
A062212003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Kartini, SE., M.Si., Ak.CA
NIP. 196503051992032001


Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196511271991032001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP 196703191992032003


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Sayyidatun Ufairah Anto

NIM : A062212003

Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis, dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan perturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Januari 2024



Andi Sayyidatun Ufairah Anto

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “:**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia**” tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar magister akuntansi jurusan akuntansi Universitas Hasanuddin

Tesis ini disusun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak langsung maupun tidak langsung dengan segala kerendahan hati untuk membantu dengan caranya masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas anugerah dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Andi Anto dan Ibu Husnaeni yang selalu mendoakan, memberi kasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran, memberi dukungan dan motivasinya tiada henti, baik secara moril maupun materil.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada bidang akademik.
4. Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Ibu Prof. Dr. Kartini, SE.,M.Si.Ak.CA. selaku pembimbing I dan Ibu Prof Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing II tesis yang telah bersedia untuk membimbing penulis selama proses penulisan tesis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Program Pasaca Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
7. Keluarga penulis, Andi Fadhil Machmud Al-Gazali selaku adik yang sudah mendoakan dan selalu memberikan dukungan baik.
8. Teman-teman Reguler A yang telah memberi semangat untuk penulis selama proses penyusunan skripsi.
9. Untuk Annisa dan Dhila teman yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam proses penyusunan tesis.
10. Teman-teman Jurusan Magister Akuntansi Angkatan 2021/2 yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
11. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan tesis yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkat serta rahmatNya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan masih terdapat kekurangan dan kekeliruan yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih jika pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang dapat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak

Makassar, 12 Januari 2024

Andi Sayyidatun Ufairah Anto

ABSTRAK

ANDI SAYYIDATUN UFAIRAH ANTO. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan *Internet Financial Reporting* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia (dibimbing oleh Kartini dan Nirwana).

Penelitian ini bertujuan menguji adanya pengaruh ukuran pemerintah, belanja daerah, *leverage*, dan opini audit sebagai variabel moderasi terhadap internet financial reporting. Penelitian ini dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2017--2021. Populasi penelitian ditentukan dengan teknik penyampelan purposif dan diperoleh tiga belas provinsi dari keseluruhannya yang sesuai dengan kriteria yg telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang diperoleh melalui teknik pengumpulan dokumen. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi yang dimoderasi dengan menggunakan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemerintah daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting*; (2) belanja daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting*; (3) *leverage* berpengaruh terhadap *internet financial reporting*; (4) opini audit dapat memoderasi ukuran pemerintah daerah terhadap *internet financial reporting*; (5) opini audit tidak dapat memoderasi belanja daerah terhadap *internet financial reporting*, dan (6) opini audit tidak dapat memoderasi *leverage* terhadap *internet financial reporting*.

Kata kunci: ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, *leverage*, opini audit, *internet financial reporting*

ABSTRACT

ANDI SAYYIDATUN UFAIRAH ANTO. Factors Affecting Disclosure of Internet Financial Reporting in Provincial Government in Indonesia (supervised by Kartini and Niwana)

This research aims to test the effect of government size, regional spending, leverage, and audit opinion as moderating variables on internet financial reporting. This research was carried out in 34 provinces throughout Indonesia from 2017 to 2021 as a population and used purposive sampling techniques to collect research samples consisting of 1.3 provinces that met the criteria in this research. This research used secondary data in the form of panel data obtained through a document collection technique. The statistical method used to test the hypothesis was moderated regression analysis, carried out using SPSS 26. The results of this research show that (1) local government affects internet financial reporting; (2) regional spending affects internet financial reporting; (3) leverage affects internet financial reporting; (4) audit opinion can moderate local government measures of internet financial reporting, (5) audit opinion cannot moderate regional spending on internet financial reporting, and (6) audit opinion cannot moderate leverage on internet financial reporting

Keywords: regional government size, regional spending, leverage, audit opinion, internet financial reporting

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	11
2.1.1 Teori Agensi.....	11
2.1.2 Internet Financial Reporting (IFR)	13
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.1.4 Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	16
2.1.5 Ukuran Pemerintah Daerah	18
2.1.6 Belanja Daerah	19
2.1.7 Leverage.....	20
2.1.8 Opini Audit	21
2.2 Tinjauan Empiris	23

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran	31
3.2 Hipotesis.....	35
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Rancangan Penelitian	44
4.1.1 Jenis Penelitian	44
4.1.2 Desain Penelitian	45
4.2 Populasi Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel	45
4.3 Jenis Dan Sumber Data	47
4.4 Metode Pengumpulan Data	48
4.5 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	48
4.5.1 Variable Dependen	48
4.5.2 Variabel Independen	50
4.5.3 Variabel Moderasi	51
4.6 Instrumen Penelitian	52
4.7 Teknik Analisis Data	52
4.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	53
4.7.2 Uji Asumsi Klasik	54
4.7.3 Uji Hipotesis	55
4.7.4 Uji Kelayakan Model	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Analisis data	58
5.1.1 Analisis Statistik Deskriptif	58
5.1.2 Uji Asumsi Klasik	60
5.1.4 Hasil <i>Modereted Regression Analysis</i>	65
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian	71
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Implikasi	83
6.3 keterbatasan	83
6.4 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

Daftar Gambar

Gambar

3.1 Kerangka Pemikiran	34
3.2 Kerangka Penelitian	43

Daftar Tabel

Tabel

4.1 provinsi di indonseia dan website.....	46
4.2 Jumlah sampel	47
4.3 Indeks Aksesibilitas Internet Financial Reporting	49
5.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	58
5.2 Hasil Uji Normalitas	61
5.3 Hasil Uji Normalitas setelah Outlier	62
5.4 Hasil Uji Multikolonrarutas	63
5.5 Hasil Uji Heterokedastisitas	64
5.6 Hasil Uji Autokorelasi	65
5.7 Hasil Analisis Regresi Moderasi	66
5.8 Hasil Pengujian Hipotesis	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Ukuran Pemerintah Daerah	91
2. Belanja Daerah	94
3. <i>Levegare</i>	97
4. Opini Audit	100
5. Indeks Aksesibilitas IFR	103
6. Hasil Olah Data	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Internet Financial Reporting adalah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan melalui internet (Oktaviani *et al.*, 2020). Adanya pelaporan keuangan melalui internet sangat bermanfaat karena dapat menghemat biaya penyebaran informasi keuangan. Penerapan *Internet Financial Reporting* pada pemerintahan, yaitu meliputi informasi keuangan perusahaan melalui internet pada website resmi pemerintah daerah, yang hanya mendukung penyediaan informasi yang relevan dan menjadi sarana utama pelaporan keuangan yang mengubah sistem *paper-based reporting system* menjadi *paper-less reporting system* (dewi mustika, 2019.).

Dengan keunggulan internet tersebut, pemerintah daerah sudah seharusnya membuat website resmi untuk mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan, internet mengubah penyajian informasi perusahaan secara tradisional. Pengungkapan dengan metode berbasis kertas tradisional memiliki kelemahan waktu yang terbatas untuk pengarsipan. Di era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia dapat tinggal di daerah maupun negara manapun, sehingga dengan menggunakan metode pelaporan keuangan internet untuk keterbukaan informasi sudah tersedia di website resmi pemerintah daerah dan dapat dilakukan kapan saja.

Internet adalah jaringan global terdesentralisasi karena tidak "diatur" oleh perusahaan atau negara mana pun. Jadi siapa pun dapat menggunakan layanan ini selama mereka memiliki akses. Internet dapat digunakan sebagai media untuk

menyediakan informasi penting karena kelebihanannya seperti distribusi yang mudah, tanpa batas, biaya rendah dan interaksi yang tinggi. (Narsa & Pratiwi, 2018), maka *Internet Financial Reporting* sangat diperlukan.

Transparansi adalah asas yang menjamin bahwa informasi tentang penyelenggaraan negara dapat diakses secara bebas oleh semua orang. Salah satu bentuk transparansi pemerintah daerah kepada publik adalah keterbukaannya dalam mengkomunikasikan informasi publik. Berdasarkan menteri dalam negeri nomor 188.52/1797/SJ/2012 mengenai peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah yang menginstruksikan Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia agar dapat menyiapkan menu dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)" dalam website resmi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keuangan melalui internet.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2010 mengenai sistem informasi keuangan daerah yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi dalam menyalurkan informasi keuangan melalui situs resmi telah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah adalah untuk menyampaikan informasi, ditegaskan melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa badan publik harus bersifat terbuka dan bertanggungjawab atas setiap informasi publik.

Meskipun peraturan perundang undangan terkait kewajiban dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan dokumen apa saja yang perlu disajikan telah ditetapkan, pemerintah pusat belum maksimal dalam melakukan pengukuran dan pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan

daerah berdasarkan ketaatan terhadap peraturan perundangan tersebut (Farida dan intisari, 2017).

Tanpa adanya pengukuran dan pemeringkatan, pemerintah daerah cenderung mengabaikan arti penting transparansi dan tidak memiliki semangat berkompetisi untuk menjadi lebih baik dalam hal transparansi pengelolaan keuangan. Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang dan peraturan pemerintah, terkait penyampaian informasi kepada publik, pemerintah daerah seharusnya telah menggunakan internet sebagai media untuk menyampaikan laporan keuangan (*Internet Financial Reporting*) kepada masyarakat. (Wijaya *et al.*, 2020)

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang transparansi informasi pemerintah di situs resmi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana peraturan ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik yang diwajibkan oleh pemerintah dan lembaga negara kepada masyarakat melalui situs resmi. Keterbukaan informasi dipublikasikan oleh Pemerintah melalui media elektronik, informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan PP No. 13 Tahun 2019.

Pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangannya di situs resminya, namun setiap pemerintah daerah memiliki alasan dan pertimbangan untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan laporan keuangannya di Internet. Di dunia modern saat ini, lembaga atau pemerintahan membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan bersih, atau yang dikenal dengan bentuk pemerintahan yang bersih atau good governance (Putera, 2016). Adanya tuntutan transparansi dalam pelaporan keuangan tersebut menarik perhatian negara berkembang seperti Indonesia. Tujuannya agar masyarakat

dapat melihat apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan instansi pemerintah terkait penggunaan anggaran yang ada dalam mereplikasi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia diakui oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008.

Secara jelas undang- undang ini menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik secara transparan dengan tanggung jawab dan orientasi terhadap pelayanan masyarakat sehingga mudah untuk diakses cepat, efisien dan juga mudah dipahami oleh masyarakat (Nosihana & Yaya, 2016).

Banyaknya situs web resmi pemerintah yang dapat diakses dengan berbagai jenis informasi namun pemanfaatan website resmi pemerintah daerah sebagai media pelaporan informasi keuangan dan non keuangan masih belum optimal sehingga mengakibatkan terbatasnya ketersedianya beberapa informasi keuangan dan non keuangan. Motivasi untuk melaporkan informasi pemerintah secara sukarela ke situs web bervariasi sesuai dengan urgensi masing-masing provinsi yang mengakibatkan minimnya informasi dan pelayanan publik yang seharusnya dimuat di situs resmi pemerintah daerah (website resmi pemerintah daerah) tetapi tidak diposting.

Kelebihan Internet dibandingkan media lain dengan jumlah pengguna internet terus tumbuh secara eksponensial. Menurut Internet World Stats, jumlah pengguna Internet (Netter) di seluruh dunia telah meningkat secara dramatis selama dekade terakhir. Menurut (easydigital.id) Data Pengguna Digital Di Indonesia Tahun 2022 adalah sebanyak 204,7 juta pengguna internet pada Januari 2022. Penetrasi internet di Indonesia akan mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal tahun 2022. Menurut analisis Kepios, pengguna internet di Indonesia akan tumbuh sebesar 2,1 juta (+1,0%) antara tahun 2021 dan 2022.

Teori keagenan menggambarkan dua pelaku ekonomi yang berlawanan yaitu prinsipal dan agen. Menciptakan hubungan proxy ketika satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan layanan dan membuat keputusan demi kepentingan terbaik principal. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai agen dan klien adalah masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat sebagai klien memberikan kekuatan dan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan untuk menjaga transparansi dalam mengkomunikasikan hasil implementasi kepada masyarakat.

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah asimetri informasi. Asimetri informasi telah terbukti mendorong penipuan dan korupsi pemerintah (*agent*). Upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Cara yang mudah untuk memperoleh informasi adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan di Internet atau di situs resmi pemerintah daerah.

Penelitian mengenai *Internet Financial Reporting* terhadap ukuran pemerintah sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh (Azis *et al.*, 2020), (Hadianto & Murtin, 2020), dan (Mutiha, 2017). Yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting*, Ukuran pemerintah merupakan jumlah asset yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin besar jumlah asset yang dimiliki oleh pemerintah maka menunjukkan semakin besar pula ukuran pemerintah (Azis *et al.*, 2020).

Sehingga ukuran pemda memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* pemerintah daerah. Namun hasil berbeda terdapat pada penelitian (Moehardiono & Yulianti, 2021), (Masra & Sari, 2020) yang menyatakan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

Penelitian mengenai *Internet Financial Reporting* terhadap belanja daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh (Putri & Setiawan, 2022), (Alhajjriana *et al.*, 2018), (Masra & Sari, 2020), (Mutiha, 2017). Yang menyatakan bahwa belanja daerah suatu daerah yang tinggi kemudian dapat mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi pula.

Belanja daerah dapat menjadi faktor pendorong pemda untuk melakukan pelaporan keuangan di internet karena semakin besar belanja daerah menunjukkan bahwa pemda memberikan pelayanan yang baik dan fasilitas yang berkualitas kepada masyarakat (Pratama *et al.*, 2015). Sebagaimana belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang digunakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Namun hasil berbeda terdapat pada penelitian (Azis *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Penelitian mengenai *Internet Financial Reporting* terhadap *Leverage* sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh (Nufus *et al.*, 2019) *Leverage* yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk menyediakan media pengawasan kepada kreditur untuk memantau penggunaan dana pinjaman dan untuk memantau kemampuan pemerintah dalam membayar utangnya.

(Nufus *et al.*, 2019) menyatakan bahawa dengan adanya *internet financial reporting* akan menjadi media pengawasan yang tepat yang dapat disediakan oleh pemerintah bagi kreditur karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta hemat biaya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nufus *et al.*, 2019) Yang mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Leverage menunjukkan kemampuan suatu lembaga untuk membayar utang jangka panjangnya. Ritonga *et al.*, (2012) menyimpulkan bahwa solvabilitas jangka panjang, termasuk *leverage*, adalah aspek kondisi keuangan yang

dianggap paling penting oleh pengguna laporan keuangan pemerintah. Namun hasil berbeda terdapat dalam penelitian (Diptyana & Rokhmania, 2018a) yang menyatakan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Peneliti mencoba memasukkan variabel opini audit yang menjadi variabel moderasi dalam model penelitian karena opini audit yang baik dapat diperoleh dari kinerja pemerintah yang baik serta merupakan gambaran dari pengelolaan keuangan daerah yang tertip oleh pemerintah (Hiola *et al.*, 2016).

Menurut Nufus *et al.*, (2019) Masyarakat menuntut agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam penyampaian program mereka, serta dapat mendorong kepatuhan pemda dalam mengungkapkan informasi keuangan di *website*. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dapat memfasilitasi kepatuhan ketika pemerintah mengungkapkan informasi keuangan di situs webnya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Alhajjriana *et al.*, (2018) yang menguji pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, jumlah anggota legislatif, dan jumlah penduduk *internet financial reporting* pada pemerintah daerah dan pengaruh *internet financial reporting* pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu jenis variabel yang di ambil, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel moderasi yaitu ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, dan *leverage* sebagai variabel bebas serta opini audit sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah 34 pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021.

Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan 5 jenis variabel yaitu pendapatan asli daerah, belanja daerah, jumlah anggota legislatif, jumlah penduduk dan akuntabilitas laporan keuangan daerah dan objek penelitiannya yaitu 32 pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2012-2014. Alasan pengambilan variabel dalam penelitian ini dikarenakan terdapatnya ketidakkonsistenan yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyebabkan adanya asimetri pada variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti ingin menguji dan menganalisis kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *internet financial reporting* pada pemerintah provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, dan, *leverage* pada *internet financial reporting* di Indonesia, dan opini audit sebagai variabel moderasi untuk memperkuat hubungan antara ukuran dan *leverage* pemerintah daerah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* ?
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *internet financial reporting*?
4. Apakah Opini Audit berpengaruh dalam memperkuat hubungan antara ukuran pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting*?
5. Apakah Opini Audit berpengaruh dalam memperkuat hubungan antara belanja daerah terhadap *Internet Financial Reporting*?

6. Apakah Opini Audit berpengaruh dalam memperkuat hubungan antara *leverage* terhadap *Internet Financial Reporting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting*.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap *Internet Financial Reporting*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *internet financial reporting*.
4. Untuk menganalisis pengaruh opini audit dalam memperkuat hubungan antara ukuran pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting*.
5. Untuk menganalisis pengaruh opini audit dalam memperkuat hubungan antara belanja daerah terhadap *Internet Financial Reporting*.
6. Untuk menganalisis pengaruh opini audit dalam memperkuat hubungan antara *leverage* terhadap *Internet Financial Reporting*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Mengembangkan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya yang berkaitan dengan penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintahan serta tingkat keterbukaan informasi website.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- i. Bagi pemerintah agar dapat menerapkan dan memanfaatkan IFR dengan baik agar dapat membantu untuk meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak khususnya masyarakat.

- ii. Bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori meliputi teori keagenan, teori signalling, *Internet Financial Reporting*, Ukuran Pemerintah daerah, belanja daerah, *leverage*, dan opini audit, serta kerangka pemikiran. Selain itu juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka pemikiran serta hipotesis dalam penelitian ini.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variable serta metode analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data, analisis data, hasil analisis serta pembahasan mengenai hasil yang disapatkan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan didefinisikan sebagai segala bentuk interaksi antara dua pihak atau lebih, dengan satu pihak sebagai agen dan pihak lain sebagai prinsipal. (Scott, 2015) menyebutkan bahwa konsep dari Teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen untuk melakukan tugas atas nama prinsipal, dan agen adalah pihak yang melakukan kepentingan prinsipal.

Hubungan keagenan, adalah kontrak antara prinsipal dan agen yang memungkinkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Dimana dalam sektor publik di Indonesia, yang berperan sebagai principal adalah masyarakat yang memberikan wewenang dan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah selaku agent, dengan harapan bahwa agent dapat bertindak/melakukan pekerjaan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh principal.

Teori ini sebenarnya mencoba untuk mengatasi ketika ada perbedaan yang mempengaruhi kepentingan kedua belah pihak. Menurut Jensen & Meckling (1976), agar dapat mengoptimalkan setiap pengambilan keputusan, hubungan keagenan terdapat tiga jenis biaya yang pertama *monitoring cost*, yakni biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent.

Yang ke dua *bonding cost*, yakni biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Yang ketiga *residual loss* berupa

berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal.

Dengan adanya publikasi pengelolaan keuangan melalui internet dapat menghindarkan masalah asimetri informasi, meminimalkan *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss* serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sesuai karakteristik *good and clean governance* (muuna., et, al. 2023).

Hubungan antara pemerintahan dan masyarakat adalah hubungan keagenan (Banker & Paxton, 1987). Dalam pemerintahan Indonesia, pemerintah bertindak sebagai agen untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai subjeknya. Pemerintah daerah, sebagai prinsipal, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan.

Pemerintah, sebagai agen berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan negara kepada masyarakat. Pemerintah akan mencoba bereaksi sebagai agen dalam menjalankan segala dari urusan pemerintahan sesuai dengan apa saja keperluan dari masyarakat yang berlaku juga sebagai principal.

Menurut Eisenhardt, (1989) fokus teori ini adalah menentukan kontrak yang paling efisien. Karena kontrak yang mengatur hubungan prinsipal-agen yang dianalisis. Teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi: Artinya, (1) asumsi tentang manusia menekankan bahwa manusia pada dasarnya egois (*self-interest*), membatasi rasionalitasnya (*limited rationality*), dan menghindari risiko (*risk aversion*). (2) Asumsi organisasi adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya informasi asimetris antara prinsipal dan agen. (3) Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Untuk mengurangi tingkat asimetri tersebut, pemerintah diharuskan untuk lebih transparan mengenai informasi pengelolaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Sehingga transparansi pengelolaan keuangan negara dapat menimbulkan rasa percaya terhadap masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari masyarakat

2.1.2 Internet Financial Reporting (IFR)

Evans dan Patton, (1987) menyatakan Sektor publik dalam konteks teori signalling, diartikan bahwa pemerintah akan berusaha memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. *Internet Financial Reporting* (IFR) adalah bentuk akuntabilitas pemerintah untuk pelaporan anggaran yang dikendalikan pemerintah dan dilaporkan melalui Internet.

Penerapan *Internet Financial Reporting* pada pemerintah memiliki beberapa keunggulan. Pertama, bagi pemerintah, penggunaan Internet sebagai media pengungkapan laporan keuangan menghilangkan kebutuhan untuk mencetak laporan keuangan, sehingga menghemat biaya pemerintah. Kedua, memungkinkan masyarakat untuk melihat laporan keuangan pemerintah dengan murah, mudah dan cepat melalui Internet.

Pengungkapan *Internet Financial Reporting* mungkin memiliki keunggulan dibandingkan lembaga e-government karena informasi dapat didistribusikan lebih cepat dan digunakan secara langsung sehubungan dengan pengungkapan pelaporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik harus bersifat terbuka dan bertanggungjawab atas setiap informasi publik.

Salah satu bentuk keterbukaan dan tanggungjawab informasi itu adalah penyampaian laporan keuangan suatu lembaga (atau yang disebut dengan

Internet Financial Reporting) sehingga penyampaian informasi menjadi lebih efisien dan cepat untuk diakses (Moehardiono & Yuliati, 2021).

Putri & Setiawan, (2022) menjelaskan pengungkapan *Internet financial reporting* adalah aksesibilitas pelaporan keuangan terkait untuk memudahkan pengguna atau pemangku kepentingan menemukan informasi keuangan yang disediakan di Internet. Tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang membantu mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam.

Maka dari itu internet dapat digunakan untuk pelaporan keuangan. *Internet financial reporting* berisi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan SAL, laporan operasi (LO).

Penyajian informasi keuangan dengan perantara internet atau yang dinamakan Internet Financial Reporting (IFR) adalah cara perusahaan atau pemerintah untuk menyebarluaskan atau mempublikasikan informasi keuangannya kepada publik melalui internet (Sukmadilaga *et al.*, 2019)

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang akan dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Putri & Setiawan, 2022).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk akuntansi untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dikeluarkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat diukur dalam satuan moneter, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah untuk keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dimonetisasi dalam tindakan pemerintah daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.

Yang dimaksud di sini adalah pemerintahan negara yang otonom menurut hukum. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Unsur utama pendanaan daerah terdiri dari hak daerah, kewajiban daerah, dan aset yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terpadu berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Sekretaris Jenderal Daerah menjalankan kekuasaannya dan bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Koordinator pengendalian keuangan daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan.

Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Menetapkan peraturan daerah tentang prinsip akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dimana

sistem akuntansi pemerintah daerah telah ditetapkan dengan ketentuan walikota tentang peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

2.1.4 Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan daerah merupakan hasil dari proses akuntansi keuangan daerah, termasuk laporan keuangan. Laporan keuangan sangat berguna dalam menilai dan mengetahui nilai dari sumber daya ekonomi yang digunakan. Dalam hal ini anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintah, penilaian posisi keuangan pemerintah daerah, atau penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perlu dilakukan audit untuk mempersoalkan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan Akuntabilitas LKPD dilakukan oleh BPK RI sebagai Pemeriksa Pengendalian dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Lembaga Pemeriksa Keuangan.

Akuntabilitas menurut Mursyidi, (2013:44) yaitu "Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik". Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP No 71 tahun 2010 yaitu "Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik".

Amijaya, (2019) menyatakan Akutabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kepala daerah kepada pemerintah pusat serta bentuk

pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas Horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas.

Terdapat lima dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut (Hopwood & Tomkins, 1984; Elwood, 1993; dalam Amijaya 2019), yaitu: yang pertama Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapat otorisasi.

Kedua Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidak efektifan organisasi.

Ketiga akuntabilitas program Lembaga-lembaga public harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya.

Keempat akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan memperoleh manfaat dan kerugian atas kebijakan tersebut. Langkah apa yang dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif jika timbul.

Kelima akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial.

Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Kekuatan utama adalah pemberian informasi.

2.1.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah diartikan sebagai skala yang menggambarkan seberapa besar ataupun kecil suatu pemerintah daerah (Moehardiono & Yulianti, 2021). Besar kecilnya pemerintahan yang dinyatakan dengan total aset yang dimiliki daerah merupakan indikator untuk mengukur kemudahan menjalankan kegiatan di daerah tersebut, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional (Sari & Mustanda, 2019).

Ukuran pemerintah daerah dapat mempermudah pengungkapan informasi keuangan pemerintah melalui internet untuk monitoring dan pelaporan sehingga tidak terjadi asimetri antara masyarakat dengan pemerintah (Azis *et al.*, 2020). Potensi opini negatif masyarakat tentang kinerja pemerintah dapat diatasi melalui transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk meringankan asumsi ini, pemerintah dapat menerbitkan laporan keuangan menggunakan media yang lebih murah dan lebih cepat. Ukuran pemerintah mengacu pada ukuran organisasi.

Pemerintah daerah yang besar sangat diharapkan agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada banyak pemangku kepentingan. Keinginan dan kebutuhan pemerintah daerah merupakan katalisator untuk mencapai arah pemerintah daerah yang lebih baik.

2.1.6 Belanja Daerah

Belanja daerah berdasarkan PSAP No.2, adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah didefinisikan sebagai komitmen pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai aset bersih. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua jenis urusan pemerintahan daerah.

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan adalah pengeluaran yang berasal dari rekening keuangan umum daerah yang tidak wajib diganti oleh pemerintah daerah dan pengeluaran lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dipperlakukan sebagai pengurang dari modal yang diakui yang mewakili kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah dapat menjadi faktor pendorong pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan keuangan di internet karena semakin besar belanja daerah menunjukkan bahwa pemda memberikan pelayanan yang baik dan fasilitas yang berkualitas kepada masyarakat (Pratama *et al.*, 2015).

Klasifikasi belanja daerah menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan, yaitu yang

pertama “Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.”

Yang kedua “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.”

Yang ketiga “Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah”.

2.1.7 Leverage

Rasio pembiayaan utang atau *leverage* adalah kemampuan pemerintah untuk menjamin dana pinjaman dengan menggunakan jumlah aset yang dimiliki pemerintah dalam menyediakan program dan layanan kepada masyarakat pada masa sekarang dan di masa yang akan datang (Hardianto & Murtin, 2020).

Menurut Kasmir (2014:153) *Leverage* adalah Rasio solvabilitas atau leverage ratio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Brigham & Houston, (2010:140) menyatakan bahwa rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (financial leverage) sehingga kita mampu melihat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan hutang.

Berdasarkan pengertian di atas, rasio *leverage* adalah indikator keuangan yang mengukur kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban jangka

panjangnya (pinjaman jangka panjang) seperti pembayaran bunga atas hutangnya, pembayaran pokok akhir hutangnya, dan lain-lain. Utang jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran dengan jangka waktu satu tahun atau lebih.

Leverage yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk menyediakan media pengawasan untuk kreditur dalam memantau penggunaan dana pinjaman dan untuk memantau kemampuan pemerintah dalam mengontrol penggunaan utang yang memberatkan APBD. *Internet Financial Reporting* menjadi salah satu cara yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan tidak mahal, ini bisa menjadi media pemantauan yang cocok bagi pemerintah untuk diberikan kepada kreditur mereka.

Leverage menunjukkan kemampuan suatu lembaga untuk membayar utang jangka panjangnya. Ritonga *et al.*, (2012) menyimpulkan bahwa solvabilitas jangka panjang, termasuk *leverage*, adalah aspek kondisi keuangan yang dianggap paling penting oleh pengguna laporan keuangan pemerintah.

2.1.8 Opini Audit

Menurut Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan didalam laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LPKD).

Kecukupan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria: kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.

Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan opini tertinggi dari hasil pemeriksaan. Pemeriksa dapat memberikan pendapat bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah tersajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan SAP yang berlaku.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), merupakan opini pemeriksaan setelah WTP. Dalam hal ini pemeriksa berpendapat bahwa laporan keuangan telah, menunjukkan laporan yang wajar, kecuali untuk komponen-komponen tertentu dengan kriteria: Sebagai laporan keuangan disusun tidak memenuhi standar akuntansi keuangan dan ruang lingkup pemeriksaan dibatasi.

Opini Tidak Wajar (TW), yaitu opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material karena tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tidak memenuhi kaidah-kaidah yang seharusnya. Opini jenis ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bias dan menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) opini ini muncul karena para auditor menemukan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dokumen yang mendukung laporan keuangan yang diperiksa. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bias meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Opini ini bias diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh bukti yang dibutuhkan untuk bias menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar. Kriterianya ialah ruang lingkup

audit dibatasi, auditor tidak independen dan tidak ada kriteria dalam menilai laporan keuangan.

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris adalah penelitian yang mengacu pada penelitian masa lalu, dan juga digunakan sebagai bahan acuan untuk memahami penelitian yang merangkum hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan internet financial reporting. Berikut ini adalah penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan internet financial reporting.

Alhajjriana *et al.*, (2018) “faktor-faktor yang mempengaruhi internet financial reporting pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, jumlah anggota legislatif, dan jumlah penduduk terhadap internet financial reporting pemerintah daerah; dan pengaruh internet financial reporting pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Data penelitian ini terdiri dari 96 observasi dari 32 pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2012-2014. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengeluaran daerah berpengaruh terhadap pemerintah daerah, sedangkan pendapatan daerah, jumlah anggota legislatif, dan populasi tidak berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Terlebih lagi internet financial reporting, pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah.

Putri & Setiawan, (2022) “pengaruh kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (ifr) pada pemerintah daerah”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan memperoleh

bukti empiris mengenai pengaruh kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap pengungkapan keuangan internet pelaporan (ifr) di pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota pemerintah provinsi sumatera barat periode 2018-2020 selama 3 tahun. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah kekayaan daerah dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *internet financial reporting* (ifr) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat tahun 2018 sampai tahun 2020 yang memiliki kekayaan daerah yang besar, belum bisa dijadikan sebagai acuan dalam membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah bertindak transparansi dalam mengungkapkan laporan keuangan didaerahnya melalui internet.

Sedangkan hasil dari belanja daerah dalam pengujian hipotesis berpengaruh signifikan terhadap *pengungkapan internet financial reporting* (ifr) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat tahun 2018 sampai tahun 2020 yang memiliki belanja daerah yang semakin rendah, maka pengungkapan ifr pada pemerintah daerah semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tingginya belanja daerah, maka semakin rendah pengungkapan ifr pada pemerintah daerahnya

Moehardiono & Yuliati, (2021) "pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, opini audit terhadap internet financial reporting pemerintah kota/kabupaten jawa timur". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit terhadap internet financial reporting pemerintah kota/kabupaten di jawa timur.

Populasi pada riset ini adalah 38 pemerintah kota/kabupaten di provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2019. Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pemerintah kota/kabupaten provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2019.

Pemda dengan PAD yang besar tidak memengaruhinya dalam mengungkapkan informasi keuangannya melalui situs pemerintah daerah. Padahal, pemda yang punya pendapatan asli daerah tinggi menandakan punya kinerja yang baik sehingga dapat memberikan citra baik jika melaporkannya kepada masyarakat pendapatan asli daerah yang tinggi tidak akan berpengaruh penyajian laporan keuangan.

Besarnya pendapatan asli daerah tidak berdampak secara langsung bagi masyarakat, dimana masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemda dalam e-government (Nosihana & Yaya, 2016).

Selanjutnya pengaruh ukuran pemda terhadap praktik *internet financial reporting* tidak memengaruhi praktik *internet financial reporting* secara parsial di kota/kabupaten provinsi Jatim selama tahun 2015-2019. Hasil dari uji hipotesis tersebut mengindikasikan jika ukuran pemda tidak memengaruhi praktik *internet financial reporting* di pemerintah kota/kabupaten provinsi Jatim.

Pernyataan ini disebabkan karena masih banyaknya pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur yang masih memiliki total aset yang kurang. Hal ini menyebabkan masih banyak pemda yang belum mempublikasikan laporan keuangannya pada internet. Pemda dengan IKPD yang buruk akan memunculkan kecurigaan bagi publik. Selanjutnya pengaruh opini audit terhadap praktik *internet financial reporting* memengaruhi praktik IFR pemerintah kota/kabupaten provinsi Jatim selama tahun 2015-2019.

Pemberian opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa pemda yang bersangkutan telah melaporkan laporan keuangannya berdasarkan standar akuntansi pemerintah (sap) dan telah melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) dengan baik.

Azis *et al.*, (2020) “pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah terhadap internet financial reporting (studi pemerintah kabupaten/kota provinsi jawa timur periode 2015-2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah terhadap internet financial reporting pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/ kota di provinsi jawa timur periode 2015-2018 dan jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 kabupaten/kota di provinsi jawa timur. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap internet financial reporting pada kabupaten/kota provinsi jawa timur tahun 2015-2018.

Koefisien regresi ukuran pemerintah sebesar 3.455652 artinya memiliki arah positif terhadap internet financial reporting yaitu ketika ukuran pemerintah daerah meningkat maka internet financial reporting akan meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat, bahwa ukuran pemerintah berpengaruh terhadap internet financial reporting.

Selanjutnya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap internet financial reporting pada pemerintahan daerah provinsi jawa timur tahun 2015-2018. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat, bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap internet financial reporting. Yang terakhir belanja daerah tidak berpengaruh terhadap internet financial reporting pada

pemerintahan daerah di provinsi jawa timur tahun 2015-2018. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat, bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap internet financial reporting.

Hadianto & murtin, (2020) “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan internet financial reporting (ifr) di indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persaingan politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan hutang, pendapatan per kapita, kekayaan daerah dan opini audit terhadap pengungkapan ifr di indonesia”.

Data yang digunakan untuk analisis adalah data keuangan daerah sekunder yang ditabulasikan dari beberapa sumber digital dengan jumlah sampel 66 daerah dari jumlah penduduk seluruh pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rasio persaingan politik dan kekayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ifr.

Sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ifr. Selanjutnya, debt financing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ifr. Terakhir, pendapatan per kapita dan opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ifr.

Masra & Sari, (2020) “faktor yang mempengaruhi internet financial reporting (ifr) pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran legislatif, pendapatan per kapita, dan daerah pengeluaran pelaporan keuangan internet di kabupaten/kota provinsi sumatera barat untuk tahun 2016-2018.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 19 website pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan pengambilan sampel yang bertujuan. Hasil dari ini penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan pengeluaran daerah berpengaruh positif terhadap praktik pelaporan keuangan

internet. Sementara itu, ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap internet praktik pelaporan keuangan di situs web pemerintah daerah.

Ndoa Ta & Hapsari, (2019.) “pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah provinsi jawa timur (studi pada pemerintah daerah di provinsi jawa timur tahun 2015-2016)”.

Populasi dalam penelitian ini adalah situs resmi pemerintah daerah di provinsi jawa timur tahun 2015- 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 42 data yang terdiri dari 21 situs pemerintah daerah dengan waktu dua tahun sebagai sampel dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di provinsi jawa timur.

Opini audit, ukuran pemerintah daerah, belanja modal secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di provinsi jawa timur.

Diptyana & Rokhmania, (2018) “pengaruh faktor keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas internet financial reporting”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor keuangan terhadap kualitas internet financial reporting (ifr) pada pemerintah daerah di indonesia.

Sampel sebanyak 91 dan dianalisis menggunakan regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan likuiditas tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadap kualitas ifr pemda yang memiliki indeks ifr tertinggi dan terendah keduanya tidak mengalami kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan current ratio yang di atas 1.

Pemda yang memperoleh indeks ifr tertinggi dan terendah, keduanya memiliki nilai aset lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya. Selanjutnya leverage tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas ifr pemda, baik pemda dengan leverage tertinggi dan terendah keduanya memperoleh indeks ifr yang rendah.

Berdasarkan hasil ini, leverage tidak terbukti menjadi faktor yang mendorong kualitas informasi keuangan melalui internet di institusi pemerintah daerah. Yang terakhir financial dependency tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas ifr. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian nainggolan & purwanti (2016) dan hilmi & martani (2012), yang menyatakan tidak ada keterkaitan antara ketergantungan daerah (atau kemandirian daerah) terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Kurniawan *et al.*, (2019.) “faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah di indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah di indonesia.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, didapatkan sejumlah 70 laporan keuangan yang dapat diteliti. Hasil penelitian model penelitian i menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap ketersediaan internet financial reporting oleh pemerintah daerah, sedangkan opini audit dan kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan internet financial reporting oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian model penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah, sedangkan opini audit dan kemandirian keuangan pemerintah daerah

berpengaruh positif terhadap keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah.

Nufus *et al.*, (2019) "Pengaruh ukuran Pemda, leverage dan kinerja Keuangan terhadap IFR pada Pemda dengan Dimoderasi Opini Audit". Penelitian ini bertujuan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh ukuran pemda, leverage, dan kinerja keuangan terhadap Internet Financial Reporting (IFR) pada pemda di Indonesia serta pengaruh opini audit dalam hubungan antara ukuran pemda, leverage, dan kinerja keuangan terhadap IFR pada pemda di Indonesia.

Populasi penelitian adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Sampel diambil secara *purposive sampling* dan berjumlah 203 pemda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemda dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IFR, *leverage* berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap IFR. Opini audit berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap hubungan ukuran pemda dengan IFR serta opini audit berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap hubungan *leverage* dan kinerja keuangan dengan IFR.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya dilakukannya penelitian ini untuk meneliti adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Variabel yang menjadi faktor penelitian yaitu ukuran pemerintah, belanja daerah, *leverage* dan opini audit sebagai variabel moderasi. Berikut penjelasan secara teori mengenai variable-variabel yang terkait.

Teori utama dalam penelitian ini adalah *agency theory* yang ditemukan oleh Jensen & Meckling, (1976). Teori ini dijelaskan sebagai konsep yang menerangkan mengenai hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat dan *stakeholder* lainnya sebagai principal. Masyarakat selaku *principal* memberikan amanat dan kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahnya, agar bertindak transparansi dalam melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat.

Dalam hal ini, masalah agensi terjadi karena pemerintah sebagai agen yang memiliki kewajiban dalam melaporkan hasil keuangan maupun non keuangan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, dalam melaporkan hasil keuangan maupun non keuangan pemerintah masih kurang maksimal dalam penggunaan website pada setiap daerah provinsi sebagai wadah dalam melaporkan hasil keuangan maupun non keuangan agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Hubungan keagenan dapat menimbulkan sebuah permasalahan yaitu salah satunya berupa asimetri informasi. Asimetri informasi diindikasikan dapat mendorong terjadinya penyelewangan dan tindakan korupsi yang dilakukan

pemerintah (*agent*), dan permasalahan ini juga dapat mengakibatkan terjadinya *agency cost* (biaya keagenan) yang akan ditanggung pemerintah dalam bertindak transparan (Putri & Setiawan 2022)

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi, yaitu pemerintah harus lebih meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, dan dapat terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi konflik kepentingan.

Salah satu bentuk kemudahan dalam mendapatkan informasi yaitu mempublikasikan laporan keuangan melalui internet atau website resmi pemerintah daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu variabel yang menggambarkan besar kecilnya pemerintahan di suatu daerah dan dapat diukur dari besaran aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas (Rufayda, 2020.) Pengungkapan informasi keuangan yang disajikan secara lengkap menunjukkan inisiatif bagi pemerintah daerah tersebut untuk lebih transparan dalam pengelolaan pemerintahannya.

Melalui internet, pemerintah dapat memberikan informasi keuangan secara cepat dengan biaya rendah, sehingga kebutuhan pelaporan terpenuhi dan biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi. Aset dapat menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah atas perolehan dari kejadian di masa lalu serta darimana manfaat ekonomi pada masa depan diharap untuk didapatkan (Moehardiono & yulianti 2021).

Pemerintah yang mempunyai aset yang lebih banyak cenderung lebih ketat saat mengelola dan menjaga asetnya. Dengan begitu ukuran atau total aset pemerintah daerah yang besar menyebabkan pemerintah daerah cenderung akan

mempublikasikan informasi keuangan pemerintah daerahnya (Masra & Sari, 2020).

Belanja daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Tingginya belanja daerah, dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pemerintah daerah telah menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan publik, sehingga dapat diartikan semakin tinggi belanja daerah, maka semakin tinggi juga keinginan pemerintah dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada publik khususnya melalui *website* pemerintah (Putri & Setiawan 2022).

Belanja daerah yang semakin tinggi juga akan mulai berdampak pada anggaran dari daerah yang seharusnya menunjukkan apakah pihak dari pemerintah telah melakukan dan mempergunakan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat, artinya dapat diindikasikan keinginan dari pemerintah daerah pun juga akan terlihat semakin meningkat hanya untuk menyampaikan hal laporan dari keuangannya kepada masyarakat melalui dari *website* dari pemerintah tersebut (Alhajriana, 2017)

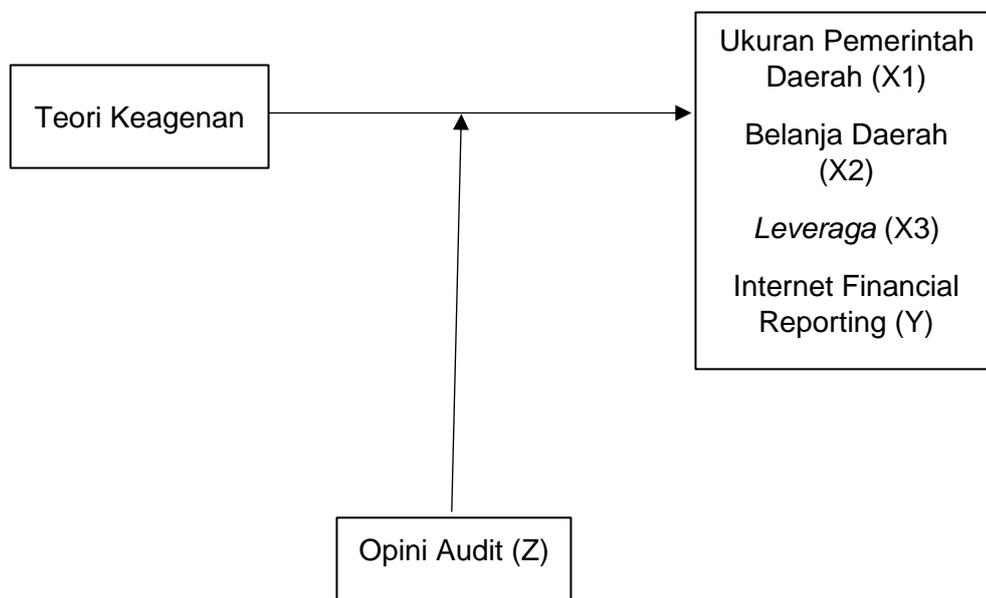
Leverage adalah indikator keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya (pinjaman jangka panjang). *Leverage* menunjukkan kemampuan suatu lembaga untuk membayar utang jangka panjangnya (Diptyana, 2019)

Leverage yang tinggi akan menuntut pemerintah untuk menyediakan media pengawasan bagi kreditur untuk mengawasi penggunaan dana yang dipinjam serta memonitor kesanggupan pemerintah dalam melunasi hutang.

Internet Financial Reporting dapat menjadi media pengawasan yang tepat yang dapat disediakan oleh pemerintah bagi kreditur karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta hemat biaya. (Husuf *et al.*, 20219)

Opini Audit merupakan Pendapat akuntan publik atau auditor atas proses audit yang dilakukan pada suatu lembaga tertentu (Moehardiono & Yuliati, 2021). Dalam hal ini, auditor mengevaluasi laporan keuangan tahunan yang disampaikan dan memberikan pendapat atas kualitas perusahaan yang diaudit. Sehubungan dengan teori sigal, salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman informasi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah mengumumkan hasil audit dari masing-masing daerah. Dengan diumumkannya hasil audit akan membuat pemerintah daerah dapat termotifasi untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini menggunakan kerangka sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

3.2 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini berfungsi sebagai dugaan sementara bahwa terdapat pengaruh terhadap ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, pendapatan asli daerah, dan opini audit terhadap *Internet Financial Reporting*. Berdasarkan hipotesis ini akan dilakukan pengujian untuk mengetahui pernyataan tersebut dapat diterima atau ditolak secara statistik dengan sampel yang sudah ditentukan.

Pengaruh Ukuran Pemerinta Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Ukuran pemerintah daerah merupakan skala yang menggambarkan seberapa besar ataupun kecil suatu pemerintah daerah (Prima dan Verawaty, 2018). *Internet Financial Reporting* (IFR) berfungsi untuk menekankan dan meminimalisir biaya untuk pemantauan dalam pelaporan keuangan melalui internet pada website pemerintah, serta fungsi IFR lebih efisiensi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi (Masra & Sari, 2020).

Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin kompleks struktur agensinya. Pemerintah daerah yang besar dengan ukuran pemerintahan yang besar dapat mendorong pemerintah untuk melakukan publikasi informasi keuangan dalam *website* (Sari & Mustanda, 2019).

Penggunaan teknologi informasi, termasuk internet, dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, dapat membantu dalam mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, IFR dapat mengurangi risiko agensi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Chodijah *et al.*, 2018).

Menurut Sari & Mustanda (2019) Teori agensi akan memprediksi bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin kompleks struktur agensinya, dan semakin besar kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena

itu, pemerintah daerah yang lebih besar cenderung lebih mungkin untuk mengadopsi praktik IFR yang lebih maju guna mengurangi risiko agensi.

Hasil penelitian Hadianto & Murtin (2020) mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azis *et al.* (2020), Mariani, (2019) dan Mutiha, (2017) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

Hasil berbeda terdapat pada penelitian Moehardiono & Yuliati, (2021), Masra & Fitri, (2020) yang menyatakan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

H1: Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap *internet financial reporting*

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Belanja daerah merupakan kebutuhan dan beban bagi pemerintah daerah yang kemudian diakui sebagai penyusutan daerah. Kemudian belanja daerah yang lebih tinggi juga mempengaruhi anggaran daerah, yang seharusnya menunjukkan apakah pemerintah daerah mengelola dan menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat. (Masra & Sari, 2020).

Teori agensi memiliki peran dimana pemerintah bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja daerah, sementara masyarakat adalah prinsipal yang memercayakan otoritas kepada pemerintah. *Internet financial reporting* dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat (Wijaya *et al.*, 2020).

Teori agensi mempertimbangkan biaya dan manfaat dari praktik pelaporan keuangan online. Pemerintah daerah mungkin perlu menimbang antara biaya pelaksanaan sistem pelaporan keuangan online dengan manfaat yang diharapkan

dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas. (Putri W.& Setiawan M. 2022)

Hasil penelitian Putri & Setiawan, (2022) megatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* . Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evin A. M. dan Vita F. (2020), Alhajiriana., *et al* (2017) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terdahap *Internet Financial Reporting* (IFR).

Hasil berbeda pada penelitian Indriani Azis & Dini Wahjoe Hapsari (2020) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

H2: Belanja derah berpengaruh terhadap *internet financial reporting*

Pengaruh *Leverage* Terhdap *Internet Financial Reporing*

Leverage merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah dibiayai dengan utang. Utang jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran dengan jangka waktu satu tahun atau lebih *Internet financial reporting* dilengkapi dengan dukungan infrastruktur sistem informasi yang tepat dan dibangun dengan strategi yang tepat.

Leverage atau tingkat utang pemerintah dapat mempengaruhi kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Semakin tinggi tingkat utang, semakin besar kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi keuangan tersedia secara online dan mudah diakses oleh masyarakat untuk memperoleh kepercayaan dan meminimalkan potensi konflik keagenan (Pribadi Y 2017).

Dari perspektif teori agensi pemerintah sebagai agen dapat memanfaatkan internet financial reporting untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat hubungan kepercayaan dengan masyarakat sebagai principal. Dengan

memberikan akses yang mudah terhadap informasi keuangan secara online, pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga meminimalkan potensi timbulnya konflik keagenan Oktaviani *et al.*, (2020).

Dalam konteks pengendalian biaya keagenan, penggunaan leverage yang berlebihan oleh pemerintah dapat menimbulkan kekhawatiran akan risiko keuangan. Internet financial reporting dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadaan keuangan pemerintah.

Hasil Penelitian Nufus *et al.*, (2019) mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani & Mudjiyanti (2017), Intan (2018) dan Oktaviani *et al.*, (2020) Yang mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Hasil berbeda terdapat dalam penelitian Diptyana & Rokhmania, (2018) yang menyatakan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap *internet financial reporting*

Opini Audit Memoderasi Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Ukuran pemerintah daerah dapat mempermudah pengungkapan informasi keuangan pemerintah melalui internet untuk monitoring dan pelaporan sehingga tidak terjadi asimetri antara masyarakat dengan pemerintah (Azis *et al.*, 2020). Semakin besar ukuran pemerintah, masyarakat akan semakin tertarik pada aset pemerintah (Moehardiono & Yuliati, 2021).

Teori agensi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami perilaku agen yang bertindak atas nama prinsipal dalam suatu organisasi. Teori agensi dapat digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah, sebagai prinsipal, mempengaruhi perilaku auditor dalam menyajikan laporan keuangan secara online.

Besarnya ukuran pemerintah membuat peran BPK RI sebagai auditor pemerintah untuk mengurangi adanya asimetri informasi antara agent dan principal untuk menjaga kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar akan memiliki pengelolaan yang semakin sulit, sehingga dapat menyebabkan pemerintah daerah enggan untuk mengungkapkan informasi keuangan di *website* resmi yang dimiliki (Adriana *et al.*, 2017)

Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar, memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengendalikan informasi yang disajikan dalam *internet financial reporting* (Azis *et al.*, 2020). Opini audit yang kuat dan independen dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan informasi atau manipulasi oleh pemerintah daerah dalam *internet financial reporting* (Nusut *et al.*, 2019)

Potensi opini negatif masyarakat tentang kinerja pemerintah dapat diatasi melalui transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dari organisasi eksternal untuk praktik pelaporan keuangan yang baik cenderung mempublikasikan laporan keuangan mereka di Internet (Nufus *et al.*, 2019).

Akibatnya pemerintah daerah akan semakin didorong untuk mengungkapkan informasi keuangan di situs web mereka ketika hasil audit positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit yang baik dapat memperkuat hubungan antara ukuran pemerintah daerah dan *internet financial reporting*.

H4: Opini audit memoderasi pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *internet financial reporting*

Opini Audit Memoderasi Pengaruh Belanja Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Berdasarkan PSAP No 2 PP 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa belanja daerah adalah belanja pemerintah daerah yang memiliki manfaat melebihi 1 tahun anggaran sehingga dapat menambah asset maupun kekayaan daerah serta menambah belanja yang bersifat rutin seperti peralatan, infrastruktur, maupun harta tetap lainnya. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran (Alhajjriana *et al.*, 2018).

Berdasarkan teori agensi dengan melihat bagaimana auditor bertindak sebagai agen untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah adalah akurat dan dapat dipercaya.

Dengan adanya opini audit yang independen dan adil, pemangku kepentingan dapat lebih percaya pada informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan praktik pengeluaran yang lebih bertanggung jawab, karena pemerintah menyadari bahwa keputusan keuangan pemerintah akan dievaluasi secara independen oleh auditor. (Nufus *et al.*, 2019).

Apabila belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, maka ini dapat memperkuat integritas laporan keuangan entitas tersebut. Sebaliknya, jika ada masalah dalam pengelolaan belanja daerah, ini dapat memengaruhi opini audit terhadap laporan keuangan. (Adriana & Ritonga, 2017).

Penggunaan internet financial reporting dapat memengaruhi opini audit. Jika entitas menggunakan internet financial reporting untuk menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan transparan, hal ini dapat memberikan keyakinan kepada auditor bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya (Adriana, A., & Ritonga, I. T. 2017). Sebaliknya, jika entitas tidak transparan dalam menyajikan informasi keuangan secara online, hal ini dapat menjadi perhatian bagi auditor dan mempengaruhi opini audit.

Opini audit menurut PP no. 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan yang memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan yang sesuai. Maka peran dari opini audit akan memberikan dorongan kepada pemerintah agar dalam menyampaikan laporan keuangan dapat sesuai dengan standar akuntansi serta dapat mengungkapkan laporan tersebut pada web mereka.

Dengan demikian, opini audit dapat memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap internet financial reporting dengan memberikan penilaian independen terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas tersebut. Opini audit yang positif dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa entitas tersebut mengelola belanja daerah dan menyajikan informasi keuangan secara transparan, sementara opini audit yang negatif dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah dan penyajian informasi keuangan

Sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit yang baik dapat memperkuat hubungan antara belanja daerah dan *internet financial reporting*

H5: Opini audit memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap *internet financial reporting*

Opini Audit Memoderasi Pengaruh *Leverage* Terhadap *Internet Financial Reporting*

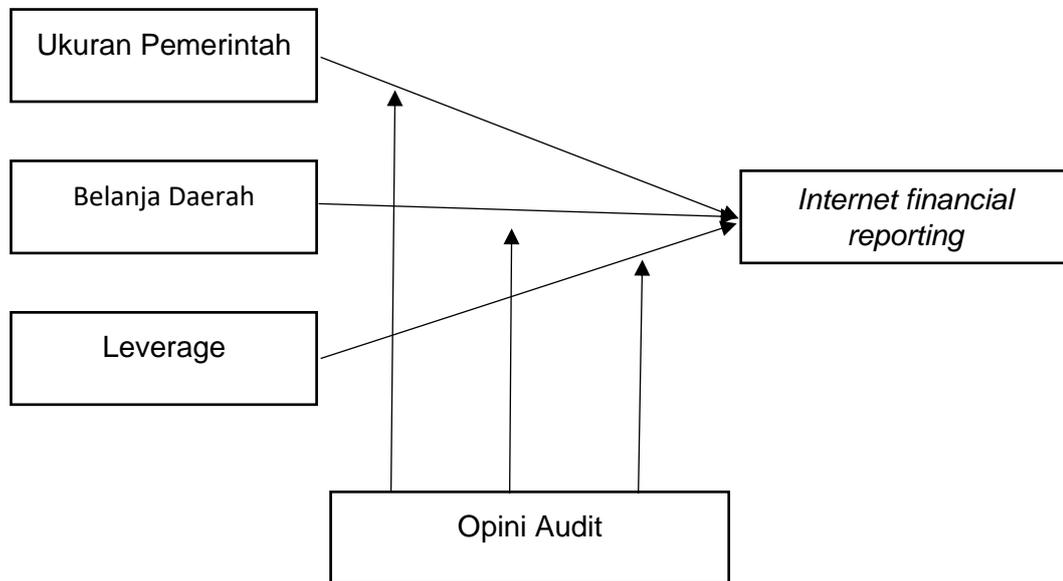
Leverage mewakili kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan semua asetnya untuk menjamin dana pinjaman. Pemerintah dengan *leverage* tinggi menghadapi lebih banyak pengawasan dari kreditur (Nufus *et al.*, 2019). Internet dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sarana untuk mengawasi kreditur mereka.

Opini audit yang kuat dan independen dapat memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan secara online oleh pemerintah telah disusun secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Moehardiono *et al.*, 2020). Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disediakan, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak negatif dari *leverage* yang tinggi (Nusuf *et al.*, 2019)

Dalam teori agensi, opini audit dapat berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang membantu mengurangi informasi asimetris antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Opini audit yang positif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi keuangan yang disajikan, terutama dalam situasi di mana *leverage* pemerintah tinggi. Sebaliknya, opini audit negatif dapat menimbulkan keraguan terhadap keandalan informasi keuangan, yang dapat memperburuk efek *leverage* yang tinggi.

Pemerintah daerah dapat lebih termotivasi untuk mengungkapkan laporan keuangan melalui pelaporan keuangan internet ketika mendapatkan opini audit yang baik seperti Wajar Tanpa Pengecualian. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit yang baik dapat memperkuat hubungan antara *leverage* dan *internet financial reporting*

H6: Opini Audit memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *internet financial reporting*



Gambar 3.2 Kerangka Penelitian